

Judul : Perluah Wapres & beberapa Menteri mulai berkantor di IKN?
Tanggal : Rabu, 01 April 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 2

Perluah Wapres & Beberapa Menteri Mulai Berkantor Di IKN?

Di tengah kemajuan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), muncul usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri mulai berkantor di IKN. Usulan ini pun menjadi perbincangan di kalangan anggota Komisi II DPR. Dalam rapat antara Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2026), muncul usulan tersebut. Usulan itu datang dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedy Sitorus. Dia menilai, langkah Wapres dan beberapa menteri berkantor di IKN diperlukan agar bangunan di IKN segera dimanfaatkan

sehingga tidak rusak karena tidak dipakai. Dia juga mengusulkan, sejumlah kementerian mulai menempatkan pejabatnya bekerja dari IKN secara bergiliran. "Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keanakan di Jakarta," ujar Dedy. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap, Wapres Gibran akan mulai berkantor di IKN mulai tahun ini. Adapun bocoran

ini juga disampaikan Basuki saat ditanya Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2026). Menurut Basuki, kemungkinan mulai tahun ini Gibran berkantor dari IKN. "Insyaallah (tahun ini)," ucap Basuki. "Tadi ada isu katanya Wapres mau berkantor ada kabar enggak?" tanya Rifq ke Basuki. "Saya kira iya karena sudah ada mengaskan 50 staf ke sana untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera," jawab Basuki. Dihubungi terpisah, Ketua

Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berpandangan, keberadaan Wapres beserta beberapa Menteri/Wakil Menteri bersama pejabat di kementerian/lembaga bisa menggerakkan beberapa program strategis nasional. Pasalnya, lanjut dia, berkantor IKN dalam rangka pemerataan antara barat, tengah dan timur. "Posisi IKN di tengah, memungkinkan bisa mengontrol program-program strategis nasional di tengah dan timur," ungkap Rifqinizamy kepada Rakyat Merdeka, Senin (30/3/2026). Sedangkan, Anggota Komisi

III DPR Mardani Ali Sera menilai, jauh sebelum berkantor di IKN, lebih baik Wapres maupun Kementerian memiliki kepastian kewenangan dalam bertugas. Sebab, kata dia, dengan kewenangan pekerjaannya yang sesuai akan lebih baik. "Berkantor di IKN tanpa otoritas yang pas maka kurang optimal," ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka, Selasa (31/3/2025). Untuk mengetahui pandangan dari Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Mardani Ali Sera mengenai usulan Wapres dan beberapa menteri berkantor di IKN, berikut wawancaranya.

RIFQINIZAMY KARSAYUDA, Ketua Komisi II DPR

Wapres Bisa Gerakkan Program Strategis Dari IKN



“Wapres dibantu oleh beberapa wakil-wakil menteri dan pejabat-pejabat di bawah itu. Apakah dirjen atau para direktur-direktur.”

Apa tanggapan Anda dengan adanya usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri berkantor di IKN?

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Kepala Otorita IKN, kami di Komisi II DPR menekankan pentingnya fungsionalisasi fasilitas infrastruktur IKN. Salah satu yang mengemuka adalah mendorong saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di IKN yang tentu fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kementerian/lembaga yang ada.

Apakah ini usulan dari semua Anggota Komisi II DPR?

Ada beberapa usul, salah satunya mendorong kementerian/kementerian yang

terkait dengan dengan fungsi-fungsi yang memungkinkan berkantor di IKN.

Kementerian apa saja yang diusulkan berkantor di IKN?

Seperti Menteri Kehutanan, Menteri Desa, dan Menteri Transmigrasi. Ada juga usulan yang sudah lama saya usulkan.

Apakah usulan Anda?

Wapres dibantu oleh beberapa wakil-wakil menteri dan pejabat-pejabat di bawah itu. Apakah dirjen atau para direktur-direktur.

Lantas, apa fungsi dari Wapres dan beberapa menteri berkantor di IKN saat ini?

Wapres bisa menggerakkan beberapa program strategis nasional melalui IKN dalam rangka pemerataan

antara barat, tengah dan timur. Posisi IKN di tengah, memungkinkan bisa mengontrol program-program strategis nasional di tengah dan timur.

Program apa saja yang Anda maksud?

Misal ketahanan pangan, lahannya itu banyak sekali di bagian timur Indonesia. Untuk itu, Wapres bisa lebih efektif memastikan itu. Bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik.

Selain itu?

Termasuk mendorong berbagai macam potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya di kawasan tengah dan timur Indonesia. Agar keinginan kita membangun Indonesia semakin dan memfungsikan IKN pada titik lain dapat dilakukan. ■

MARDANI ALI SERA, Anggota Komisi III DPR

Usulan Bagus, IKN Perlu Dioptimalkan



“PKS sejak awal satu-satunya fraksi yang menolak IKN. Tapi karena dana APBN sudah digunakan, maka tanggung jawab kita mengoptimalkan apa yang sudah dibangun.”

Bagaimana Bapak melihat usulan agar Wapres dan beberapa menteri mulai berkantor di IKN?

Bagus IKN bisa digunakan. Mahal dan perlu dioptimalkan IKN. Apalagi banyak gedung dan fasilitas sudah jadi. PKS sejak awal satu-satunya fraksi yang menolak IKN. Tapi karena dana APBN sudah digunakan maka tanggung jawab kita mengoptimalkan apa yang sudah dibangun. Apalagi lebaran kemarin, IKN jadi magnet baru wisata masyarakat. Artinya sudah siap untuk digunakan.

Mengenai penempatan pejabat yang lebih awal berkantor di IKN, Anda setuju?

Banyak kementerian yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Tapi jangan dipaksakan. Bisa

juga dilemurkan diberi beberapa opsi bagi swasta atau privat. Sudah banyak wisatawan hadir perlu banyak sarana pelengkap yang bisa diberikan pada privat untuk partisipasi. Tentu dengan pengawasan dari Otoritas IKN.

Bagaimana pandangan, tantangan dan kendala yang harus diantisipasi oleh Pemerintah jika ingin mengoptimalkan infrastruktur di IKN?

Kelenturan perizinan.

Kalau dengan Wapres berkantor di IKN dengan tujuan menjaga program strategis di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, bagaimana itu?

Bagus. Lebih dekat dan lebih hemat. Indonesia Timur masih jauh ter-tinggal. Asta Cita Pak Prabowo men-

bangun dari desa dan dari bawah. Tapi tentu berkantor saja tanpa diberikan otoritas yang pas kurang optimal. Zaman Wapres Pak Ma'ruf Amin, beliau Ketua Otoritas Papua.

Artinya perlu otoritas yang pas dan optimal untuk Wapres?

Berkantor dimanapun tanpa otoritas spesifik tidak optimal. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Misal meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pertanian di wilayah Indonesia Timur.

Jadi Presiden harus memberikan wewenang kepada Wapres ya untuk mengurus beberapa sektor sebelum berkantor di IKN?

Presiden dan Wakil Presiden bisa seperti dwi tunggal. Saling percaya dan diberikan target. ■